



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024-2026**

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. Bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, pada diktum ketiga huruf c menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Perkada;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
2. Bupati adalah Bupati Seruyan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan;
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan Kabupaten Seruyan.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun;

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan penjabaran dari RPD.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD ditetapkan oleh Bupati Seruyan;
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra-PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu;
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra-PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra-PD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD mengalami perubahan, maka Renstra-PD juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

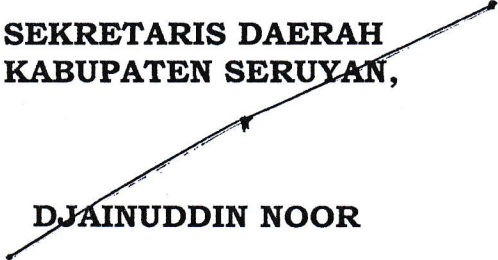
Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI SERUYAN,


YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 11 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**


DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR 13.....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN TAHUN 2024-2026

Perangkat Daerah : w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan.

Perangkat Daerah :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu;
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i

Daftar Tabel ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 I.1. Latar Belakang..... 1

 I.2. Dasar Hukum Penyusunan..... 4

 I.3. Maksud dan Tujuan 5

 I.4. Sistematika Penyusunan Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan 7

 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah7

 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah16

 2.2.1. Sumber Daya Manusia.....16

 2.2.2. Sarana dan Prasarana.....17

 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah20

 2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....24

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDALITBANG Kab.Seruyan 25

 3.1. Pelayanan BAPPEDALITBANG25

 3.2. Isu Strategis.....26

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN28

 4.1. Tujuan28

 4.2. Sasaran28

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....77

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...79

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN98

BAB VIII PENUTUP.....101

DAFTAR TABEL

Bagan 1.1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.....28

Tabel 2.1. Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG.....9

Tabel 2.2.1. Jumlah dan Status Pegawai BAPPEDALITBANG 16

Tabel 2.2.2. Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 16

Tabel 2.2.3. Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Ruang 17

Tabel 2.2.4. Sarana dan Prasarana BAPPEDALITBANG Kab. Seruyan 2024..... 17

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDALITBANG Kab. Seruyan 2024-202621

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan BAPPEDALITBANG Kab. Seruyan 2024-202623

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan 2024-2026..... 29

Tabel 4.2. Cascade Tujuan s/d Sub Kegiatan Beserta Indikator Kinerja
BAPPEDA Kabupaten Seruyan33

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BAPPEDALITBANG Kab. Seruyan
2024-2026 77

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan pada
Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024-202680

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Bappeda pada Perubahan RPJPD Kabupaten Seruyan
Tahun 2024-2026.....98

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkan Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu “Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan menengah Perangkat Daerah.

Sehubungan hal tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Seruyan sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Tahun 2024 – 2026 dan sesuai ketentuan tersebut, penyusunan Renstra dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026.

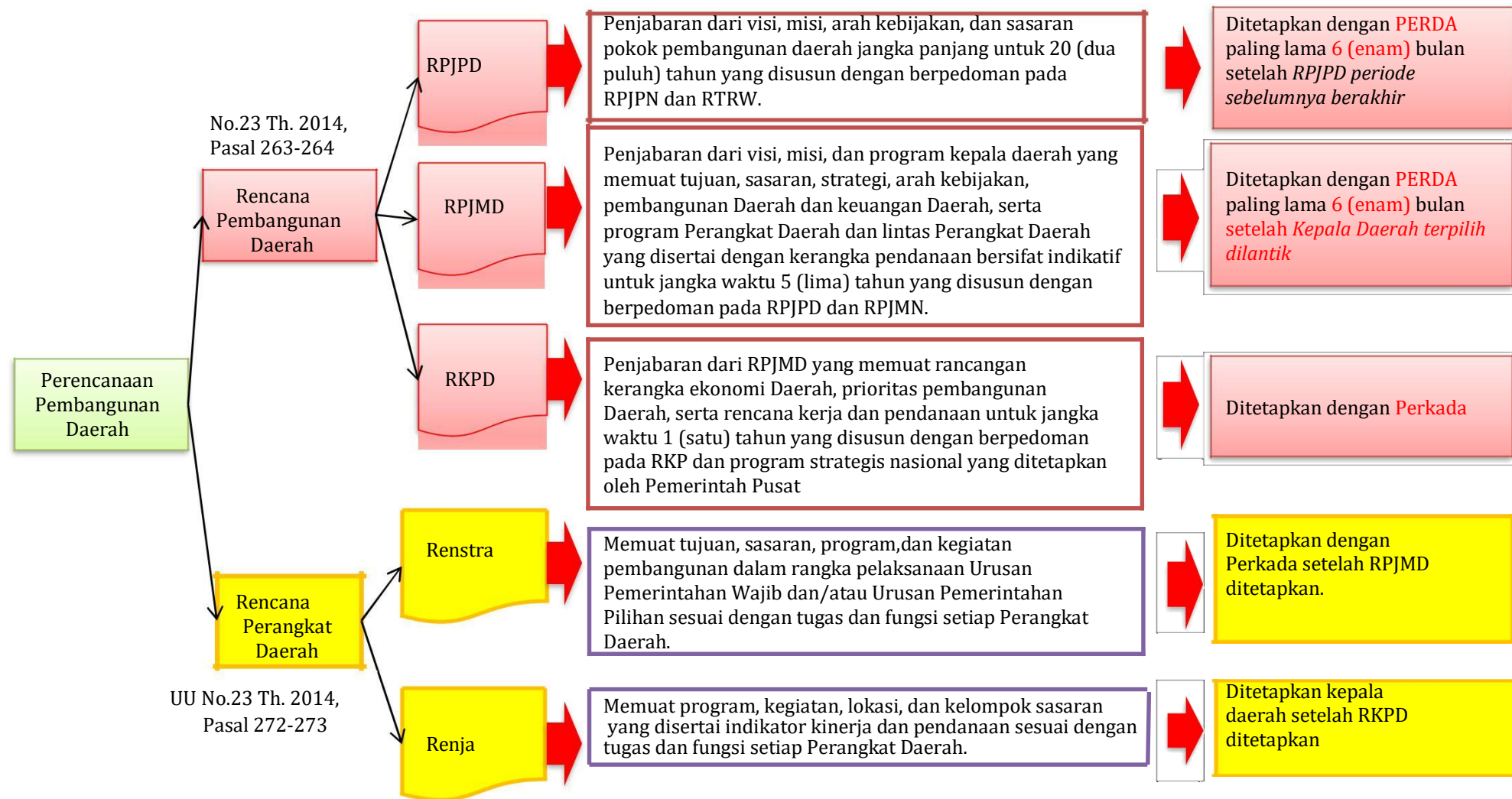
Proses penyusunan dan penetapan Renstra tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan telah mulai disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk Bappedalitbang Kabupaten Seruyan. Namun sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku terutama terkait dengan penyesuaian Program/Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berimplikasi pada perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah serta menyesuaikan dengan permasalahan/isu strategis pembangunan yang ada di Kabupaten Seruyan,

Gambaran keterkaitan Renstra dan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan menjabarkan RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 kedalam Renstra BAPPEDALITBANG Tahun 2026-2026 yang memuat tujuan dan sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDALITBANG sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan.

Pada akhirnya, Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan Tiga tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 adalah menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam Renstra Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya terkait dengan perubahan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta penyesuaian permasalahan/ isu strategis pembangunan di Kabupaten Seruyan. Hasil Renstra ini nantinya akan memberikan pedoman atau arah bagi BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan selama 3 (tiga) tahun ke depan dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Seruyan 2024–2026.

Adapun Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan substansi Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Seruyan dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Seruyan sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Seruyan dan menjadi kerangka dasar bagi Bappedalitbang Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2024–2026,
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Bappedalitbang Kabupaten Seruyan selama sisa periode Renstra;

- 3. Menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan disertai pendanaan indikatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama periode Renstra;
- 4. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan selama periode Renstra dan Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappedalitbang Kabupaten Seruyan secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur kinerja.
- 5. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Seruyan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penyusunan Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan

Dokumen Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum Penyusunan
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDALITBANG
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur BAPPEDALITBANG
2.2	Sumber Daya BAPPEDALITBANG
2.3	Kinerja Pelayanan BAPPEDALITBANG
2.4	Kelompok Sasaran Layanan
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDALITBANG
3.1	Permasalahan Pelayanan BAPPEDALITBANG
3.2	Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran
4.2	Cascading Kinerja BAPPEDALITBANG
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, maka kedudukan tugas pokok, fungsi BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Seruyan melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yaitu menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan menjalankan beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
3. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

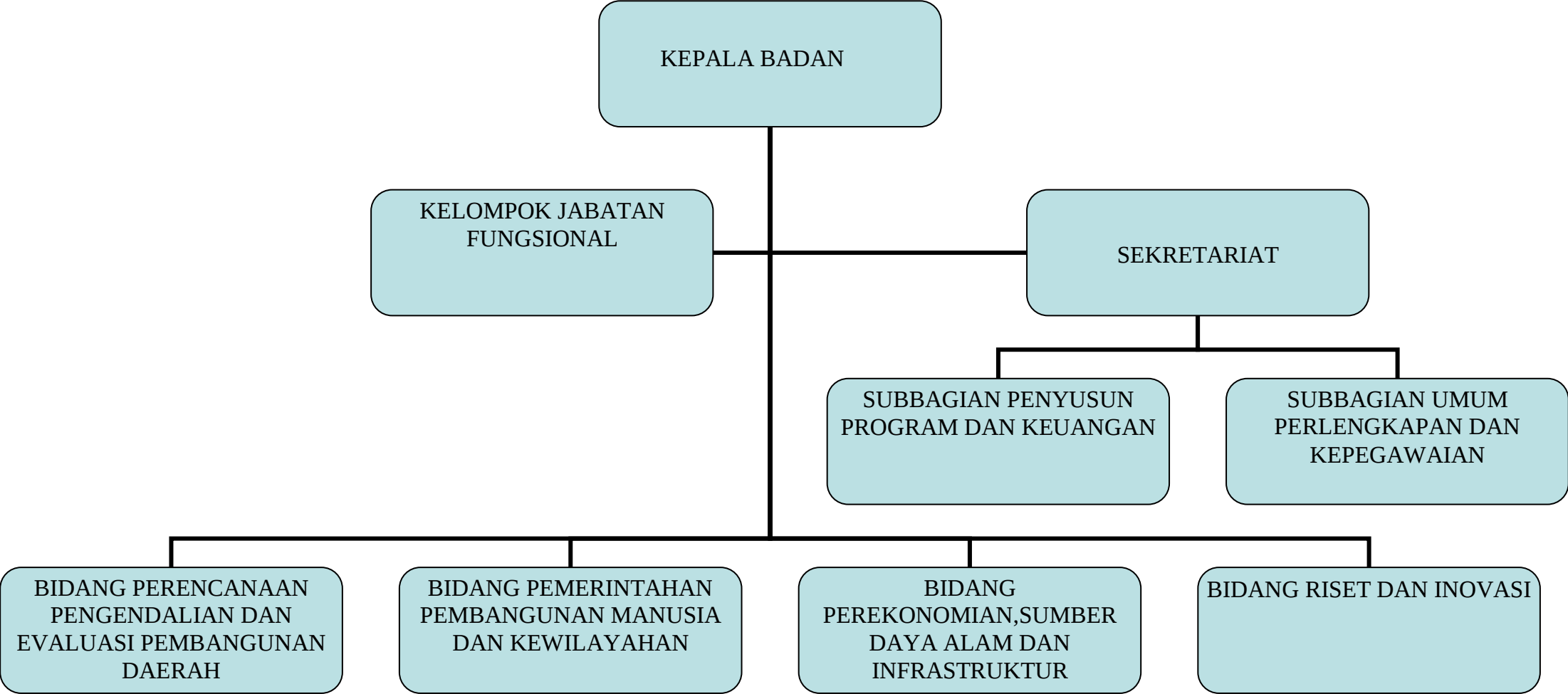
5. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 6. Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 7. Pengkoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan kependudukan dan pemerintahan;
 8. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan secara terpadu lintas negara, lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya;
 9. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 10. Penyelenggaraan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;
 11. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Bappeda ;
 12. Pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;
 13. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Bappeda dan
 14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi.
4. Struktur Organisasi

Sampai dengan tahun 2023 BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan telah mengalami 4 kali perubahan ketentuan Struktur Organisasi, Uraian Tugas masing-masing jabatan seiring dengan penyesuaian perubahan nomenklatur. Keempat ketentuan tersebut sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan;
3. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun nomenklatur SOTK Bappeda Kabupaten Seruyan menurut Peraturan Bupati Seruyan Nomor 51 Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel struktur organisasi berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERUYAN



Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 51 Tahun 2022 Tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan dapat diuraikan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Kepala Badan

- Tugas Pokok

Tugas membantu Bupati dalam penyusunan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah.

- Fungsi

- a) penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b) pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
- c) pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
- d) pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;;
- e) pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
- f) pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
- g) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbang di pemerintahan kabupaten;
- h) pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah serta melakukan pendampingan penelitian bagi warga Negara Indonesia/asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang, dan meminta laporan atas hasil penelitian.
- i) penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Badan;
- j) penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;
- k) penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan; dan
- l) pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Badan.

Sekretariat

Tugas Pokok

Sekretariat dipimpin Sekretaris mempunyai tugas pokok mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Badan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan.

Fungsi

- a) perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;

- b) pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan; penelitian dan pengembangan;
- c) pengoordinasian administrasi keuangan Badan;
- d) pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Badan;
- e) pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Badan;
- f) pengoordinasian Administrasi Umum Badan;
- g) pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- h) pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Badan;
- l) pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- j) penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- k) pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- b. melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan;
- c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Badan;
- d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Badan;
- e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
- f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Badan;
- g. melaksanakan Administrasi Keuangan Badan;
- h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan Administrasi Umum Badan;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Badan;

- d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Badan;
 - e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Badan;
 - f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
2. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
- Tugas Pokok
Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok tugas pengoordinasian, penyiapan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten, serta penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya, data dan informasi, pelaporan serta hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah.
 - Fungsi
 - a. perumusan dan pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
 - c. perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
 - d. perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
 - e. perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah;
 - f. perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
 - g. pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - h. penyusunan dan penyajian data dan informasi serta pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah kepada Kepala Badan;
 - i. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - j. pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan

1. pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Pendanaan;
 - b) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi dan
 - c) Sub Bidang Data dan Pelaporan.
3. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
 - Tugas Pokok
Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan, Pembangunan manusia dan kewilayahan.
 - Fungsinya :
 - a. penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - b. pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - d. pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - f. pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - g. pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - h. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - i. pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;

4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur

- Tugas Pokok

Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur mempunyai tugas pokok tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur.

- Fungsi

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- b. pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- d. pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- f. pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan, dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- g. pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- h. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- i. pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur.

5. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

- Tugas Pokok

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan koordinasi Riset dan Inovasi Daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

- Fungsi

- a. penyusunan dan pelaksanaan verifikasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;

- b. penyusunan dan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan, penyusunan, penyampaian laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- e. perumusan kebijakan, serta melakukan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- f. pengelolaan data dan informasi Riset dan Inovasi Daerah, menyediakan sistem informasi dan pengembangan daerah serta pelaksanaan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- h. pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan kelitbangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- i. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Riset dan Inovasi Daerah Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- j. pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- Tugas Pokok

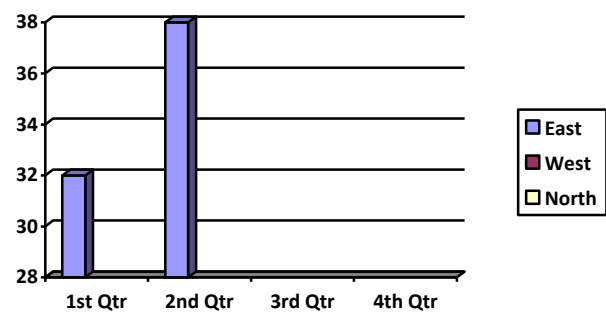
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

2.2. Sumber Daya Bappedalitbang

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kedudukan dan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, BAPPEDA Kabupaten Seruyan pada tahun 2022 didukung oleh 70 personel dengan penjelasan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2.2.1. Jumlah dan Status Pegawai BAPPEDALITBANG

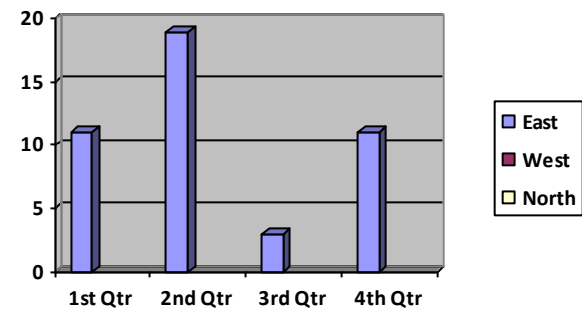


Sumber : Sub Bagian Umum Tahun 2022

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2.2.1 jumlah pegawai BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan pada tahun 2022 sebanyak 70 orang dengan status kepegawaian masih didominasi oleh tenaga kontrak/pegawai honorer sebesar 54,% atau 38 orang. Sedangkan pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 32 orang atau sekitar 46% dari jumlah seluruhnya.

Untuk klasifikasi tingkat pendidikan PNS di BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan terbagi dalam jejang pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 8 orang atau proporsinya sebesar 11 % dari seluruh jumlah PNS. Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai berjumlah 13 orang atau proporsinya sebesar 19% dari seluruh jumlah PNS, untuk Diploma III (D3) berjumlah 2 orang atau sebesar 3 % dari seluruh jumlah PNS dan klasifikasi tingkat pendidikan SMA/SMK berjumlah 8 orang dengan proporsi 11 % dari seluruh jumlah PNS.

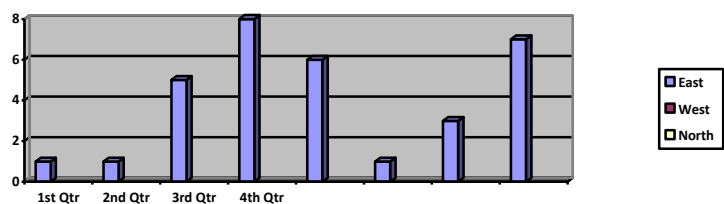
Tabel 2.2.2. Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Sub Bagian Umum Tahun 2022

Komposisi PNS Berdasarkan Jenjang Kepangkatan dan Golongan Tahun 2022 Golongan Pembina Utama Muda (IVc) Berjumlah 1 Orang Golongan Pembina Tk.I (V/b) Berjumlah 1 Orang golongan Pembina /(IV/a) Berjumlah 5 Orang golongan pangkat Penata Tk. I (III/d) berjumlah 8 orang Golongan Penata / (III/c) berjumlah 6 Orang Golongan Penata /(III/a) berjumlah 1 orang golongan Pengatur TK I /(II/d) berjumlah 3 orang golongan Pengatur / (II/c) berjumlah 7 Orang dengan penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.3. Komposisi PNS Berdasarkan Golongan Ruang



Sumber : Sub Bagian Umum Tahun 2022

- c. Posisi Tenaga Kontrak/Honoror
- Pada tahun 2022 posisi tenaga kontrak/honoror di Bappedalitbang Kabupaten Seruyan berjumlah 38 orang, dengan posisi personel sebagai berikut :
- | | |
|---|------------|
| Tenaga Kontrak Administrasi | = 27 Orang |
| Tenaga Kontrak Sopir | = - Orang |
| Tenaga Kontrak <i>Cleaning Service</i> dan Tukang Kebun | = 8 Orang |
| Tenaga Kontrak Penjaga Siang/Malam | = 3 Orang |

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Saat ini BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan memiliki gedung kantor sendiri, Jalan Jenderal A.Yani – Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan.

Tabel 2.2.4.

Sarana dan Prasarana BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2022

No	Aset BAPPEDALITBANG	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4 unit
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1 unit
4	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 unit
5	Konstruksi Pagar	1 unit
6	Kendaraan Dinas Bermotor:	
	a. Mobil	1 unit
	b. Sepeda motor	24 unit
7	Global Positioning System (GPS)	3 unit
8	Mesin Ketik Manual Standar	11 unit
9	Mesin Kalkulator	2 unit

No	Aset BAPPEDALITBANG	Jumlah
10	Rak Besi/Metal	7 unit
11	Filling Besi/Metal	7 unit
12	Brand Kas	1 unit
13	Lemari Kayu	53 unit
14	Alat Penghancur Kertas	7 unit
15	Papan Nama Instansi	1 unit
16	White Board	1 unit
17	Mesin Absensi	3 unit
18	Overhead Projector	9 unit
19	Papan Daftar	3 unit
20	Papan Nama Ruangan/Jabatan	36 Buah
21	Lemari Kayu	3 unit
22	Meja Kayu/Rotan	94 unit
23	Kursi Besi	17 unit
24	Meja Rapat	38 unit
25	Meja Makan	3 unit
26	Meja Reception	1 unit
27	Meja Panjang	1 unit
28	Kursi Rapat	323 unit
29	Kursi Tamu	3 Set
30	Kursi Tangan	50 unit
31	Kursi Putar	11 unit
32	Bangku Tunggu	10 unit
33	Kursi Lipat	14 unit
34	Meja Cetakan	3 unit
35	Meja Komputer	15 unit
36	Tenda	1 unit
37	Meja Biro	2 unit
38	Sofa	2 set
39	Gordyn Kain	1 set
40	Rak TV	1 set
41	Karpet	1 set
42	Teralis	1 set
43	Jam Mekanis	12 unit
44	Jam Listrik	1 unit
45	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2 unit
46	Mesin Potong Rumput	5 unit
47	Alat Pembersih Lain-Lain	2 unit
48	Lemari Es	1 unit
49	AC Sentral	3 unit
50	AC Split	18 unit

No	Aset BAPPEDALITBANG	Jumlah
51	Kipas Angin	8 unit
52	Kompore Gas	2 unit
53	Alat Dapur Lainnya	2 set
54	Tabung Gas	2 unit
55	Dispenser	7 unit
56	Televisi	3 unit
57	Amplifier	2 unit
58	Sound System	3 unit
59	Compact Disc	1 unit
60	Wireless	2 unit
61	Microphone Stand Floor	16 unit
62	Power Supply	19 unit
63	Stabilisator	3 unit
64	Camera Film	3 unit
65	Tangga Aluminium	4 unit
66	Handy Cam	2 unit
67	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	5 unit
68	Alat Pemadam Portable	5 unit
69	Rak Server	1 unit
70	Personal Computer	63 unit
71	Laptop	34 unit
72	Note Book	21 unit
73	Hard Disk	1 unit
74	Printer	76 unit
75	UPS	3 unit
76	Hard Disk Eksternal	3 unit
77	Stabilizer/Stavolt	1 unit
78	Server	1 unit
79	Router	1 unit
80	Hub	1 unit
81	Peralatan Jaringan Lain-Lain	1 set
82	Meja Kerja Pejabat Esselon II	1 unit
83	Meja Kerja Pejabat Esselon III	6 unit
84	Meja Rapat Pejabat Esselon III	6 unit
85	Kursi Kerja Pejabat Esselon II	1 unit
86	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	10 unit
87	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	10 unit
88	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	12 unit
89	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	5 unit
90	Microphone/Wireless Mic	1 Set
91	Pesawat Telephone	2 unit

No	Aset BAPPEDALITBANG	Jumlah
92	Facsimile	2 unit
93	CCTV	8 Set
94	Gergaji senso	1 buah
95	LOUDSPEAKER GANTUNG	2
96	LOUDSPEAKER AKTIP	2
97	CAMERA CONFERENCE	1
98	MICROPON WAIRLESS	4
99	Belanja Modal Lemari Koleksi	1
100	Belanja Modal Meja TV	1
101	PC KOMPUTER	3
102	SCANNER	1
103	LAPTOP	1
104	LAPTOP/NOTEBOOK	1

Sumber: Buku Inventaris Gabungan Bappeda Kab. Seruyan, 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari hasil analisis Laporan pencapaian kinerja pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 (LKjIP) dapat disimpulkan bahwa sampai dengan Tahun 2022 Capaian Kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan adalah memuaskan dengan persentase rata-rata pencapaian 80%. Berdasarkan hasil pengukuran atas sasaran dan indikator tersebut, maka pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran dapat dilihat dalam Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target Renstra Bappeda Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	-
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	Ada	Ada	89,47%	-	Ada	Ada	Ada	Ada	-
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	Ada	Ada	93,14%	-	Ada	Ada	Ada	ada	-
5	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			Ada	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	-
6	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			Ada	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target Renstra Bappeda Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%			99,05%	88,41%				0,99%	0,88%	
8	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Pemerinatahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%			97,12%	98,36%				0,97%	0,98%	
9	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	100%	100%	100%	100%			100%	82,69%				1%	0,83%	
10	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	100%	100%	100%			96,61%	83,72%				0,97%	0,84%	
11	Persentase Penjabaran Konsisteni Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%			100%	93,46%				1%	0,93%	
12	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%			100%	94%				1%	0,94%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target Renstra Bappeda Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	50%	50%	50%	50%	50%			4%	23%				0,08%	0,46%	
	Penelitian dan Pengembangan															
1.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	80%	80%	80%	80%	80%			76%	50%				0,95%	0,625%	
2.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	80%	80%	80%	80%	80%			100%	100%				1,25%	1,25%	
3.	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	80%	80%	80%	80%	80%			33%	32%				0,41%	0,4%	
4.	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	80%	80%	80%	80%	80%			100%	100%				1,25%	1,25%	

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kabupaten Seruyan Tahun 2022

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2022

NO	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
I	Belanja Tidak Langsung	3.082.827.323,78	3.088.935.332,00	3.871.807.449,00	4.360.120.654	2.963.869.052,00	2.855.480.995,00	3.451.907.711,00	3.891.937.747	88%	96%	92%	89%
1	Belanja Pegawai	3.082.827.323,78	3.088.935.332,00	3.871.807.449,00	4.360.120.654	2.963.869.052,00	2.855.480.995,00	3.451.907.711,00	3.891.937.747	88%	96%	92%	89%
II	Belanja Langsung	3.082.827.323,78	3.088.935.332,00	3.871.807.449,00	4.360.120.654	2.963.869.052,00	2.855.480.995,00	3.451.907.711,00	3.891.937.747	88%	96%	92%	89%
1	Belanja Pegawai	10.653.001.731,00	5.402.380.318,00	8.905.310.793,00	8.285.618.090	8.183.934.978,00	4.324.303.911,00	6.871.367.157,00	7.228.250.528	67%	77%	80%	87%
2	Belanja Barang dan Jasa	1.365.850.000,00	1.503.150.000,00	2.305.733.729,00	3.925.497.436	1.182.000.000,00	1.200.007.144,00	2.139.621.434,00	3.380.293.581	73%	87%	80%	86%
3	Belanja Modal	7.474.404.831,00	3.371.730.318,00	5.033.503.344,00	338.704.250	5.386.968.153,00	2.603.961.767,00	3.419.459.446,00	335.313.990	63%	72%	77%	99%
	Jumlah	1.812.746.900,00	527.500.000,00	758.478.000,00	8.285.618.090	1.614.966.825,00	520.335.000,00	682.682.000,00	7.228.250.528	92%	89%	99%	87%
I	Belanja Tidak Langsung	13.735.829.054,78	8.491.315.650,00	9.663.788.793,00	8.285.618.090	11.147.804.030,00	7.179.784.906,00	7.534.049.157,00	7.228.250.528	72%	81%	85%	87%

Sumber : Laporan Keuangan BAPPEDALITBANG Tahun Anggaran 2019-2022

2.2. Kelompok Sasaran Layanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kelompok Sasaran Layanan Pada Bappedalitbang Kabupaten seruyan
Adalah:

- a. Perangkat daerah :
 - Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Perangkat Daerah tepat waktu :
 - Renstra Perangkat Daerah
 - Renja Perangkat Daerah
- b. Jumlah Dokumen Kajian dan Penelitian
 - Dokumen Studi Kelayakan yang di buat
 - Mahasiswa yang mendapat ijin penelitian

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan. Konteks perumusan isu strategis BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan akan meliputi beberapa hal diantaranya adalah identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan dokumen perencanaan lainnya pada RPJPD sampai dengan tujuan akhir di dalam konteks laporan adalah melakukan Penentuan Isu Strategis BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan.

3.1. Pelayanan BAPPEDALITBANG

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten seruyan dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Pada RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, disebutkan beberapa permasalahan utama pada Kabupaten Seruyan salah satunya pada aspek SDM dan Kepegawaian yang selanjutnya dijabarkan dalam 2 pokok permasalahan, dimana Bappedalitbang terkait dengan pokok permasalahan pertama , yaitu *“Belum Optimalnya Kapasitas SDM yang sehat dan bedaya saing Pemerintahan dan Pelayanan Publik”*. Dari pokok permasalahan tersebut dirumuskan sebanyak 2 permasalahan, dimana Bappedalitbang terkait dengan permasalahan pertama yaitu Sarana prasarana peningkatan pendidikan belum memadai *“yang memiliki 2 akar masalah, yang mana akar permasalahan yang berkaitan dengan Bappedalitbang sebagai koordinator perencanaan pembangunan adalah “Belum Konsistennya Antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Penganggaran”*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan sebagai koordinator perencanaan pembangunan dan bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan, selain dihadapkan kepada tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, juga memiliki berbagai masalah yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain:

1. Belum optimalnya konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) dan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. Kesesuaian antar dokumen perencanaan, dalam hal ini terlihat dari persentase kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD dimana sejak tahun 2018-2020 terus mengalami peningkatan. Dalam mengoptimalkan tingkat kesesuaian perencanaan diperlukan adanya koordinasi intensif dan proses pengendalian dalam penyusunan perencanaan, serta

dukungan data evaluasi terhadap hasil perencanaan tersebut. Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan RPJPD.
3. Belum terpenuhinya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan mutakhir untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi maupun untuk pelaksanaan berbagai program/ kegiatan strategis.
4. Belum optimalnya penerapan dan pengelolaan Teknologi Informasi dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
5. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkualitas dan tepat waktu dan terbatasnya kuantitas formasi aparatur perencana di BAPPEDALITBANG sesuai dengan struktur perangkat daerah.
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.

3.2. Isu Strategis

Analisis isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Isu strategis bagi BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi BAPPEDALITBANG di masa Tiga tahun mendatang. Berdasarkan isu strategis RPD Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026, isu strategis BAPPEDALIBANG Kabupaten Seruyan yang menjadi permasalahan utama terletak pada *“belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik khususnya dalam hal kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah mulai dari perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaannya.”* Isu strategis tersebut merupakan hasil analisa permasalahan secara internal dan eksternal terhadap kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dengan mengedepankan 6 (enam) akar masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana program pada perencanaan jangka menengah terjabarkan dalam program perencanaan tahunan serta terwujud sinergitas antar aspek untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan.
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;

3. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi, baik untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, maupun untuk pelaksanaan berbagai program/ kegiatan strategis;
4. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappedalitbang, dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, kuantitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan;
5. Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
6. Terkait fungsi penelitian dan pengembangan khususnya dalam hal inovasi, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Seruyan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama Tiga tahun. Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Seruyan merupakan penjabaran dari Renstra Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 harus selaras dengan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada Tiga tahun mendatang. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh BAPPEDALITBANG untuk kurun waktu 3 (Tiga) tahun sampai Tahun 2026. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappedalitbang Kabupaten Seruyan mendukung arah kebijakan Kabupaten Seruyan dalam hal “*peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah*”. maka tujuan pembangunan jangka menengah BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- 2. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan. Sasaran perencanaan BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan 2024-2026, sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2. Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
- 3. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam berbagai Aspek Pembangunan.

Secara rinci sasaran BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran
BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-		
							2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP	Meningkatnya Konsistensi Dokumen perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada

						Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada
						Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan	100%	100%	100%

						Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan	100%	100%	100%
						Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	100%	100%	100%
						Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Perekonomian Sumberdaya alam,dan Infrastruktur	100%	100%	100%

3	Meningkatkan Kualitas Hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pemanfatan hasil Penelitian dan Pengembangan dalam berbagai aspek pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang di manfaatkan oleh Perangkat daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	80%	80%	80%
		Nilai SAKIP							

Sumber : Bappeda Kabupaten Seruyan (data diolah)

Tabel 4.2
Cascade Tujuan s/d Sub Kegiatan Beserta Indikator Kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappeda	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
		Nilai SAKIP	Meningkatnya Konsistensi Dokumen perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA

									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jenis honorarium yang dibayarkan
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPP dan SPM yang diterbitkan
									Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi

									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun
									Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun
									Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

							Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
									Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah
									Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

									Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah
									Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
									Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
									Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD

							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana yang ditingkatkan
									Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut yang diadakan
									Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan dan Data Administrasi Kepegawaian
									Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

									Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai yang Dimonitoring, Evaluasi dan Dinilai
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
									Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan

									Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman yang disediakan
										Jumlah Jenis Peralatan dan Bahan Pembersih yang disediakan
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan

									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan (Eksemplar Majalah/Koran/Surat Kabar/Buku dan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan)
									Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan Material yang disediakan
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu

									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar/Dalam Daerah
									Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Jenis Arsip Dinamis yang Didokumentasikan
									Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD terhadap RKBMD	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan
									Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan
									Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang Diadakan
									Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Diadakan

									Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung/Kantor Yang Diadakan
									Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim

									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kwh Rekening Listrik yang dibayarkan 1 tahun
										Jumlah Tagihan Bulanan Telepon Kabel yang dibayarkan 1 tahun
										Jumlah Tagihan m3 Air PDAM yang dibayarkan 1 tahun
										Jumlah Tagihan Bulanan Internet yang dibayarkan 1 tahun

										Jumlah Tagihan Bulanan TV Kabel yang dibayarkan 1 tahun
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Administrasi Keuangan yang Dibayarkan

							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang yang Dipelihara terhadap Jumlah Seluruh Aset di BAPPEDA	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas / Jabatan Yang dipelihara
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas / Operasional Yang dipelihara
									Pemeliharaan Meubel	Jumlah Meubel yang Dipelihara

									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki/dipelihara
									Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang diperbaiki/ dipelihara
									Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
									Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung/Kantor yang Dipelihara

									Pemeliharaan/R ekabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara
									Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara

				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

						Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik
						Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA				Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi Publik
						Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

										Jumlah Dokumen Hasil Forum Gabungan Perangkat Daerah RKPD
									Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kabupaten
										Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD
									Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Koodinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan

									Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD Murni
										Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RKPD
										Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD
										Jumlah Dokumen Perubahan RKPD
										Jumlah Dokumen Revisi RPJMD
							Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Jenis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dianalisis	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Penyajian Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

									Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
										Jumlah Perangkat Daerah Penyedia Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang dibina
									Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Pembangunan Daerah/Kota

							Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Program RPJMD Tahun Berkenaan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
								Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk ke Dalam RKPD Tahun Berkenaan	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Kerjasama Daerah
								Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk ke APBD Tahun Berkenaan	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan APBD

								Jumlah Program APBD Tahun Berkenaan		Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

						Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk kedalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
						Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk kedalam APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

						Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Perekonomian dan SDA		Jumlah Program APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
						Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				Jumlah Rencana Aksi RANHAM yang dilaporkan di Kab. Seruyan

						Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah ditetapkan dengan PERDA			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

						Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
							Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun Berkenaan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

								Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk kedalam RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun Berkenaan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
								Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk kedalam APBD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun Berkenaan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

								Jumlah Program APBD Bidang Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun Berkenaan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
							Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

								Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk ke Dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
								Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk ke APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

								Jumlah Program APBD Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
2	Meningkatkan Kualitas Hasil penelitian dan Pengembangan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya Pencapaian Pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Jenis Data Kelitbangan dan Pengkajian Peraturan yang Dikelola

		nilai SAKIP	Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam berbagai aspek pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
						Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
						Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi Daerah			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan

						Persentase Kebijakan Inovasi yang di terapkan di Daerah			Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Transmigrasi
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Industri dan Perdagangan
									Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan

									Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan
									Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral
									Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup

									Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
									Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Perkintan
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengembangkan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi dan Inovasi

									Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif
									Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan
									Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Hasil Inovasi dan Teknologi yang Dipatenkan

Sumber : Bappeda Kabupaten Seruyan (data diolah)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (Tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan kebijakan dalam Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan lintas Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh <i>stakeholders</i> pembangunan	Menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku
	Meningkatnya Konsistensi Dokumen perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Penerapan perencanaan dan penganggaran terpadu	Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dengan optimalisasi dan pengembangan <i>e-planning</i> dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
		Optimalisasi dukungan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Melaksanakan pemutakhiran dan penyajian data secara berkala (<i>continue</i>) dan akurat
		Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan dan kualitas pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas koordinasi dan supervisi perencanaan dengan Perangkat Daerah, lintas bidang, lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Kab/Kota) dan kualitas pemantauan, pengendalian, evaluasi dan supervisi pelaksanaan rencana Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Penguatan manajemen kinerja organisasi	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur perencana dan ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
			Meningkatkan dukungan pelayanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran
Meningkatkan Kualitas Hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya Pemanfatan hasil Penelitian dan Pengembangan dalam berbagai aspek pembangunan	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan	Melaksanakan penelitian dan pengembangan berdasarkan permasalahan dan prioritas daerah

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Seruyan (data diolah)

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan 2024-2026 maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan/sub kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas. Kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan dan sub kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dilengkapi dengan indikator kinerja, target, pagu indikator dan lokasi selama 3 (Tiga) tahun mulai tahun 2024 sampai dengan 2026, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan. Pada rencana program dan kegiatan Bappedalitbang berdasarkan hasil pemetaan rancangan program dan kegiatan yaitu pemetaan program dan kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Pemetaan program dan kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan pada Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kodefikasi					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										
				Urusan	Bid. Urusan	Prog	Keg	Sub Keg			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5					6					7	8						
				5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13,297,157,000.00		14,357,310,000.00		14,357,660,000.00	
				5	01				PERENCANAAN							13,297,157,000.00		14,357,310,000.00		14,357,660,000.00	
Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat daerah yang Efektif,efisien dan akuntabel	Persentas e Pelaporan	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	NilaiSAKIP Perangkat Daerah	5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	8,574,441,100.00	100%	7,055,198,102.00	100%	7,697,980,747.00
	LHKPN			5	01	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%	314,488,000.00	100%	314,488,000.00	100%	308,154,000.00			
				5	01	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	58,400,000.00	8 Dokumen	58,400,000.00	9 Dokumen	55,000,000.00		
				5	01	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	48,156,000.00	1 Dokumen	48,156,000.00	1 Dokumen	48,156,000.00		
				5	01	01	2.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	53,756,000.00	1 Dokumen	53,756,000.00	1 Dokumen	53,756,000.00		
				5	01	01	2.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	52,658,000.00	1 Dokumen	52,658,000.00	1 Dokumen	52,658,000.00		
				5	01	01	2.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	53,086,000.00	1 Dokumen	53,086,000.00	1 Dokumen	53,086,000.00		
				5	01	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-		
				5	01	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	48,432,000.00	4 Dokumen	48,432,000.00	4 Dokumen	45,498,000.00		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kodefikasi					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan					
				Urusan	Bid. Urusan	Prog	Keg	Sub Keg						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5					6				7	8					
				5	01	01	2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Keuangan (%)	100%	4,247,547,907.00	100%	4,302,700,835.00	100%	4,485,736,611.00
				5	01	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	34 Orang	3,893,231,907.00	35 Orang	3,945,700,835.00	35 Orang	4,287,494,611.00
				5	01	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jenis honorarium yang dibayarkan	8 Jenis Honorarium	349,316,000.00	8 Jenis Honorarium	352,000,000.00	2 Jenis Honorarium	193,242,000.00
				5	01	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPP dan SPM yang diterbitkan	100 Dokumen	-	100 Dokumen	-	100 Dokumen	-
				5	01	01	2.02	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-
				5	01	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	10 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00
				5	01	01	2.02	06				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-
				5	01	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-
				5	01	01	2.02	08				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-
				5	01	01	2.03					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	9,300,000.00	2 Dokumen	8,000,000.00	2 Dokumen	9,400,000.00
				5	01	01	2.03	01				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-
				5	01	01	2.03	02				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-
				5	01	01	2.03	03				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-
				5	01	01	2.03	04				Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kodefikasi					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						
				Urusan	Bid. Urusan	Prog	Keg	Sub Keg						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5					6				7	8						
				5	01	01	2.03	05					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-
				5	01	01	2.03	06					Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	9,300,000.00	2 Laporan	8,000,000.00	2 Laporan	9,400,000.00
				5	01	01	2.03	07					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-
				5	01	01	2.05						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	310,283,000.00	100%	301,014,000.00	100%	289,411,000.00
				5	01	01	2.05	01					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana yang ditingkatkan	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.05	02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut yang diadakan	80 Stel Pakaian Dinas	100,000,000.00	80 Stel Pakaian Dinas	100,000,000.00	80 Stel Pakaian Dinas	100,000,000.00
				5	01	01	2.05	03					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan dan Data Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.05	04					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.05	05					Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai yang Dimonitoring, Evaluasi dan Dinilai	80 Orang	-	80 Orang	-	80 Orang	-
				5	01	01	2.05	09					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	89,269,000.00	5 Orang	80,000,000.00	5 Orang	81,837,000.00
				5	01	01	2.05	10					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.05	11					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	121,014,000.00	5 Orang	121,014,000.00	6 Orang	107,574,000.00
				5	01	01	2.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1,223,355,500.00	100%	1,144,840,000.00	100%	938,533,800.00
				5	01	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	18 Jenis	12,135,000.00	18 Jenis	17,135,000.00	18 Jenis	13,000,000.00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kodefikasi					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						
				Urusan	Bid. Urusan	Prog	Keg	Sub Keg						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5					6				7	8						
				5	01	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	68 Jenis	141,058,500.00	68 Jenis	141,058,500.00	68 Jenis	160,000,000.00
				5	01	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6 Jenis	11,548,000.00	6 Jenis	10,000,000.00	6 Jenis	12,971,000.00
				5	01	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman yang disediakan	4 Jenis	199,472,500.00	4 Jenis	199,472,500.00	4 Jenis	194,470,800.00
														Jumlah Jenis Peralatan dan Bahan Pembersih yang disediakan	33 Jenis		33 Jenis		33 Jenis	
				5	01	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	3 Jenis	80,645,000.00	3 Jenis	75,000,000.00	3 Jenis	85,000,000.00
				5	01	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan (Eksemplar Majalah/Koran/Surat Kabar/Buku dan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan)	2 Jenis	65,330,000.00	2 Jenis	12,000,000.00	2 Jenis	13,748,000.00
				5	01	01	2.06	07					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan Material yang disediakan	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.06	08					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	40,392,500.00	12 Bulan	18,000,000.00	12 Bulan	18,990,000.00
				5	01	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar / Dalam Daerah	70 Kegiatan	672,774,000.00	60 Kegiatan	672,174,000.00	75 Kegiatan	440,354,000.00
				5	01	01	2.06	10					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Jenis Arsip Dinamis yang Didokumentasikan	500 Arsip Dinamis	-	500 Arsip Dinamis	-	500 Arsip Dinamis	-
				5	01	01	2.06	11					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.07						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD terhadap RKBMD	100%	1,481,311,426.00	100%	76,000,000.00	100%	454,200,000.00
				5	01	01	2.07	01					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.07	05					Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	2 Unit	14,657,426.00	1 Unit	6,000,000.00	2 Unit	10,000,000.00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kodefikasi					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						
				Urusan	Bid. Urusan	Prog	Keg	Sub Keg						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5					6				7	8						
				5	01	01	2.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	5 Unit	89,844,000.00	4 Unit	70,000,000.00	5 Unit	89,950,000.00
				5	01	01	2.07	07					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang Diadakan		-	-	-	-	-
				5	01	01	2.07	08					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Diadakan	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.07	09					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung/Kantor Yamg Diadakan	1 Bangunan Perluasan Aula Bappeda	1,376,810,000.00	-	-	1 Gudang Arsip	354,250,000.00
				5	01	01	2.07	10					Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	-	-	-	-	-	
				5	01	01	2.07	11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	-	-	-	-	-	
				5	01	01	2.08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	573,632,342.00	100%	523,632,342.00	100%	867,396,336.00
				5	01	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	100 Surat	-	100 Surat	-	100 Surat	-
				5	01	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kwh Rekening Listrik yang dibayarkan 1 tahun	87000 kWh	256,305,300.00	87000 kWh	256,305,300.00	87000 kWh	282,644,400.00
														Jumlah Tagihan Bulanan Telepon Kabel yang dibayarkan 1 tahun	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
														Jumlah Tagihan m3 Air PDAM yang dibayarkan 1 tahun	720 m3		720 m3		720 m3	
														Jumlah Tagihan Bulanan Internet yang dibayarkan 1 tahun	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
														Jumlah Tagihan Bulanan TV Kabel yang dibayarkan 1 tahun	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
				5	01	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Administrasi Keuangan yang Dibayarkan	7 Jenis	317,327,042.00	7 Jenis	267,327,042.00	7 Jenis	584,751,936.00
				5	01	01	2.09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang yang Dipelihara terhadap Jumlah Seluruh Aset di	100%	414,522,925.00	100%	384,522,925.00	100%	345,149,000.00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kodefikasi					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						
				Urusan	Bid. Urusan	Prog	Keg	Sub Keg						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5					6				7	8						
													BAPPEDA							
				5	01	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas / Jabatan Yang dipelihara	1 Unit/12 bulan	77,390,000.00	1 Unit/12 bulan	57,390,000.00	1 Unit/12 bulan	57,390,000.00
				5	01	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas / Operasional Yang dipelihara	25 Unit/ 12 bulan	161,630,000.00	25 Unit/ 12 bulan	151,630,000.00	25 Unit/ 12 bulan	117,664,000.00
				5	01	01	2.09	05					Pemeliharaan Meubel	Jumlah Meubel yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki/dipelihara	130 Unit	57,240,000.00	130 Unit	57,240,000.00	100 Unit	48,580,000.00
				5	01	01	2.09	07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang diperbaiki/ dipelihara	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.09	08					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung/Kantor yang Dipelihara	3 bangunan	118,262,925.00	2 Bangunan	118,262,925.00	3 Bangunan	121,515,000.00
				5	01	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rekabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.09	11					Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	5	01	02							PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	2,230,023,900.00	100%	2,369,111,898.00	100%	4,037,335,253.00
	Nilai SAKIP	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD											Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%		100%		100%	
			Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD											Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada		Ada		Ada	
														Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada		Ada		Ada	
														Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada		Ada		Ada	
				5	01	02	2.01						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen (RKPD murni, Perubahan RKPD dan Perubahan RPJMD 2018-2023)	1,115,619,400.00	2 Dokumen (RKPD murni dan Perubahan RKPD)	1,010,000,000.00	3 Dokumen (RKPD murni, Perubahan RKPD dan RPJMD 2024-2029)	2,964,144,932.00
				5	01	02	2.01	01					Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-
				5	01	02	2.01	02					Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	-	-	-	-	-	-
				5	01	02	2.01	03					Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik	2 Kegiatan	143,559,600.00	1 Kegiatan	110,000,000.00	2 Kegiatan	286,613,500.00

														Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi Publik	1 Dokumen Rancangan Awal RKPD dan 1 Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD		1 Dokumen Rancangan Awal RKPD		1 Dokumen Rancangan Awal RKPD dan 1 Dokumen Rancangan Awal RPJMD	
				5	01	02	2.01	04					Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	2 Kegiatan	131,288,700.00	1 Kegiatan	110,000,000.00	2 Kegiatan	186,216,000.00
														Jumlah Dokumen Hasil Forum Gabungan Perangkat Daerah RKPD	1 Dokumen Rancangan RKPD dan 1 Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD		1 Dokumen Rancangan RKPD		1 Dokumen Rancangan RKPD dan 1 Dokumen Rancangan RPJMD	
				5	01	02	2.01	05					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kabupaten	2 Kegiatan	132,685,900.00	1 Kegiatan	195,000,000.00	2 Kegiatan	246,394,500.00
														Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD	1 Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan 1 Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD		1 Dokumen Rancangan Akhir RKPD		1 Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan 1 Dokumen Rancangan Akhir RPJMD	
				5	01	02	2.01	06					Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Koodinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	42,730,000.00	10 Dokumen	235,000,000.00	10 Dokumen	1,681,874,932.00
				5	01	02	2.01	07					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD Murni	1 Dokumen Perbup RKPD	665,355,200.00	1 Dokumen Perbup RKPD	360,000,000.00	1 Dokumen Perbup RKPD	563,046,000.00
														Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RKPD	1 Dokumen Rancangan Perubahan RKPD		1 Dokumen Rancangan Perubahan RKPD		1 Dokumen Rancangan Perubahan RKPD	
														Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD	1 Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD		1 Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD		1 Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD	
														Jumlah Dokumen Perubahan RKPD	1 Dokumen Perbup Perubahan RKPD		1 Dokumen Perbup Perubahan RKPD		1 Dokumen Perbup Perubahan RKPD	
														Jumlah Dokumen Revisi RPJMD	1 Dokumen Perda perubahan RPJMD 2018-2023				1 Dokumen Perda RPJMD 2024-2029	
				5	01	02	2.02						Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Jenis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dianalisis	5 Jenis	557,626,500.00	5 Jenis	644,111,898.00	5 Jenis	730,000,000.00

	-			5	01	02	2.02	01					Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Penyajian Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	323,834,500.00	1 Dokumen	305,000,000.00	1 Dokumen	186,642,000.00
				5	01	02	2.02	02					Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 Dokumen	233,792,000.00	1 Dokumen	275,000,000.00	1 Dokumen	323,358,000.00
														Jumlah Perangkat Daerah Penyedia Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang dibina	23 Perangkat Daerah		23 Perangkat Daerah		23 Perangkat Daerah	
				5	01	02	2.02	03					Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Pembangunan Daerah/Kota	1 Dokumen/Buku Profil	-	1 Dokumen/Buku Profil	64,111,898.00	1 Dokumen/Buku Profil	220,000,000.00
				5	01	02	2.03						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Program RPJMD Tahun Berkenaan	133 Program	556,778,000.00	138 Program	715,000,000.00	139 Program	343,190,321.00
														Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk ke Dalam RKPD Tahun Berkenaan	133 Program		138 Program		139 Program	
														Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk ke APBD Tahun Berkenaan	133 Program		138 Program		139 Program	
														Jumlah Program APBD Tahun Berkenaan	133 Program		138 Program		139 Program	
				5	01	02	2.03	01					Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	120,360,000.00	1 Laporan	315,000,000.00	1 Laporan	150,000,000.00
				5	01	02	2.03	02					Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Kerjasama Daerah	1 Laporan	52,376,000.00	1 Laporan	230,000,000.00	-	-
				5	01	02	2.03	03					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan APBD	4 Laporan	384,042,000.00	4 Laporan	170,000,000.00	4 Laporan	193,190,321.00
														Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-
				5	01	03							PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	1,759,092,000.00	100%	4,333,000,000.00	100%	2,102,344,000.00

														Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%		100%		100%	
														Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%		100%		100%	
														Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Perekonomian dan SDA	100%		100%		100%	
														Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		100%		100%	
														Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		100%		100%	
														Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah ditetapkan dengan PERDA	Ada		Ada		Ada	
														Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Sesuai (50%)		Sesuai (50%)		Sesuai (50%)	
				5	01	03	2.01						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	50 Program	827,800,000.00	54 Program	1,333,000,000.00	55 Program	682,344,000.00
														Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk kedalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	50 Program		54 Program		55 Program	
														Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk kedalam APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	50 Program		54 Program		55 Program	
														Jumlah Program APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	50 Program		54 Program		55 Program	

				5	01	03	2.01	01					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan	253,930,000.00	7 Laporan	145,000,000.00	11 Laporan	191,720,000.00
				5	01	03	2.01	02					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	114,600,000.00	2 Laporan	160,000,000.00	2 Laporan	13,300,000.00
				5	01	03	2.01	03					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	151,894,000.00	2 Laporan	240,000,000.00	2 Laporan	211,500,000.00
				5	01	03	2.01	04					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	146,000,000.00	1 Laporan	43,000,000.00	1 Laporan	81,913,500.00
														Jumlah Rencana Aksi RANHAM yang dilaporkan di Kab. Seruyan	9 Rencana Aksi	-	9 Rencana Aksi	-	9 Rencana Aksi	-
				5	01	03	2.01	05					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11 Laporan	54,926,000.00	7 Laporan	145,000,000.00	11 Laporan	55,784,000.00
				5	01	03	2.01	06					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	9,230,000.00	2 Laporan	110,000,000.00	2 Laporan	13,000,000.00
				5	01	03	2.01	07					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	51,894,000.00	2 Laporan	250,000,000.00	2 Laporan	10,500,000.00
				5	01	03	2.01	08					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	45,326,000.00	1 Laporan	240,000,000.00	1 Laporan	104,626,500.00
				5	01	03	2.02						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun Berkenaan	42 Program	539,540,000.00	44 Program	1,870,000,000.00	43 Program	660,000,000.00

														Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk kedalam RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun Berkenaan	42 Program		44 Program		43 Program	
														Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk kedalam APBD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun Berkenaan	42 Program		44 Program		43 Program	
														Jumlah Program APBD Bidang Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun Berkenaan	42 Program		44 Program		43 Program	
				5	01	03	2.02	01					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	11 Laporan	165,420,000.00	7 Laporan	245,000,000.00	11 Laporan	70,000,000.00
				5	01	03	2.02	02					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	10,600,000.00	2 Laporan	210,000,000.00	2 Laporan	65,000,000.00
				5	01	03	2.02	03					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	52,524,000.00	2 Laporan	240,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00
				5	01	03	2.02	04					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	41,736,000.00	1 Laporan	240,000,000.00	1 Laporan	135,000,000.00
				5	01	03	2.02	05					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	11 Laporan	52,174,000.00	7 Laporan	245,000,000.00	11 Laporan	70,000,000.00
				5	01	03	2.02	06					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	17,986,000.00	2 Laporan	210,000,000.00	2 Laporan	115,000,000.00
				5	01	03	2.02	07					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	148,800,000.00	2 Laporan	240,000,000.00	2 Laporan	110,000,000.00
				5	01	03	2.02	08					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	1 Laporan	50,300,000.00	1 Laporan	240,000,000.00	1 Laporan	85,000,000.00

														Pembangunan Daerah Bidang SDA	Pembangunan Daerah Bidang SDA						
				5	01	03	2.03							Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	41	391,752,000.00	40	1,130,000,000.00	41	760,000,000.00
															Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk ke Dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	41		40		41	
															Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk ke APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	41		40		41	
															Jumlah Program APBD Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	41		40		41	
				5	01	03	2.03	01						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11 Laporan	100,880,000.00	7 Laporan	185,000,000.00	11 Laporan	220,000,000.00
				5	01	03	2.03	02						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	19,768,000.00	2 Laporan	210,000,000.00	2 Laporan	15,000,000.00
				5	01	03	2.03	03						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	50,652,000.00	2 Laporan	140,000,000.00	2 Laporan	110,000,000.00
				5	01	03	2.03	04						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	59,652,000.00	1 Laporan	145,000,000.00	1 Laporan	140,000,000.00
				5	01	03	2.03	05						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	11 Laporan	42,814,000.00	7 Laporan	145,000,000.00	11 Laporan	80,760,000.00
				5	01	03	2.03	06						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	17,986,000.00	2 Laporan	125,000,000.00	2 Laporan	63,500,000.00

				5	01	03	2.03	07					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	50,000,000.00	2 Laporan	90,000,000.00	2 Laporan	62,500,000.00
Meningkatkan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Sebagai Bahan Acuan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan	Indeks Reformasi Birokrasi			5	01	03	2.03	08					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	90,000,000.00	1 Laporan	68,240,000.00
	Nilai SAKIP			5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						733,600,000.00		600,000,000.00		520,000,000.00
		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	5	05	02							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	80%	733,600,000.00	80%	600,000,000.00	80%	520,000,000.00
														Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	80%		80%		80%	
														Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	80%		80%		80%	
														Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	80%		80%		80%	
				5	05	02	2.01						Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5 Dokumen	146,100,000.00	4 Dokumen	120,000,000.00	4 Dokumen	130,000,000.00
				5	05	02	2.01	12					Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Jenis Data Kelitbangan dan Pengkajian Peraturan yang Dikelola	5 Jenis Dokumen	146,100,000.00	4 Jenis Dokumen	120,000,000.00	4 Jenis Dokumen	130,000,000.00
				5	05	02	2.02						Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	180,000,000.00	1 Dokumen	-
				5	05	02	2.02	03					Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-

				5	05	02	2.02	05					Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	-	-	-	-	-
				5	05	02	2.02	06					Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-	-
				5	05	02	2.02	11					Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Transmigrasi	-	-	1 Dokumen	180,000,000.00	-	-
				5	05	02	2.03						Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	120,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00
				5	05	02	2.03	02					Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Industri dan Perdagangan	-	-	-	-	1 Dokumen	200,000,000.00
				5	05	02	2.03	04					Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	-	-	-	-	-	-
				5	05	02	2.03	05					Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-
				5	05	02	2.03	06					Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	1 Dokumen	300,000,000.00	-	-	-	-
				5	05	02	2.03	07					Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup	-	-	1 Dokumen	120,000,000.00	-	-
				5	05	02	2.03	09					Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-	-
				5	05	02	2.03	11					Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Perkintan	-	-	-	-	-	-
				5	05	02	2.04						Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengembangkan Inovasi dan Teknologi	5 Perangkat Daerah	287,500,000.00	5 Perangkat Daerah	180,000,000.00	5 Perangkat Daerah	190,000,000.00
				5	05	02	2.04	01					Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	140,000,000.00	1 Dokumen	90,000,000.00	1 Dokumen	95,000,000.00
				5	05	02	2.04	02					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-
				5	05	02	2.04	04					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil	2 Laporan	147,500,000.00	2 Laporan	90,000,000.00	2 Laporan	95,000,000.00

														Kelitbangan						
				5	05	02	2.04	05					Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Hasil Inovasi dan Teknologi yang Dipatenkan	1 Hasil Inovasi	-	1 Hasil Inovasi	-	1 Hasil Inovasi	-
														liat di kepmen 50		13,297,157,000.00		14,357,310,000.00		14,357,660,000.00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kodefikasi					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								
				Urusan	Bid. Urusan	Prog	Keg	Sub Keg			Target	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
												Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5					6	7	8								
				5										13,297,157,000.00		14,357,310,000.00		14,357,660,000.00	
				5	01									13,297,157,000.00		14,357,310,000.00		14,357,660,000.00	
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKJIP Bappeda	5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	8,574,441,100.00	100%	7,055,198,102.00	100%	7,697,980,747.00	
				5	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%	100%	314,488,000.00	100%	314,488,000.00	100%	308,154,000.00	
			5	01	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	58,400,000.00	8 Dokumen	58,400,000.00	9 Dokumen	55,000,000.00	
			5	01	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	48,156,000.00	1 Dokumen	48,156,000.00	1 Dokumen	48,156,000.00	
				5	01	01	2.01	03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	53,756,000.00	1 Dokumen	53,756,000.00	1 Dokumen	53,756,000.00
				5	01	01	2.01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	52,658,000.00	1 Dokumen	52,658,000.00	1 Dokumen	52,658,000.00
				5	01	01	2.01	05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	53,086,000.00	1 Dokumen	53,086,000.00	1 Dokumen	53,086,000.00
				5	01	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-
				5	01	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	48,432,000.00	4 Dokumen	48,432,000.00	4 Dokumen	45,498,000.00
				5	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Keuangan (%)	100%	100%	4,247,547,907.00	100%	4,302,700,835.00	100%	4,485,736,611.00	
				5	01	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	34 Orang	34 Orang	3,893,231,907.00	35 Orang	3,945,700,835.00	35 Orang	4,287,494,611.00
				5	01	01	2.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jenis honorarium yang dibayarkan	8 Jenis Honorarium	8 Jenis Honorarium	349,316,000.00	8 Jenis Honorarium	352,000,000.00	2 Jenis Honorarium	193,242,000.00
				5	01	01	2.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPP dan SPM yang diterbitkan	100 Dokumen	100 Dokumen	-	100 Dokumen	-	100 Dokumen	-
				5	01	01	2.02	04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-
				5	01	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	10 Dokumen	10 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00
				5	01	01	2.02	06			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-
				5	01	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-
				5	01	01	2.02	08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-
				5	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	9,300,000.00	2 Dokumen	8,000,000.00	2 Dokumen	9,400,000.00	
				5	01	01	2.03	01			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-
				5	01	01	2.03	02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-
				5	01	01	2.03	03			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-
				5	01	01	2.03	04			Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-
				5	01	01	2.03	05			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-
				5	01	01	2.03	06			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	9,300,000.00	2 Laporan	8,000,000.00	2 Laporan	9,400,000.00
				5	01	01	2.03	07			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-
				5	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	310,283,000.00	100%	301,014,000.00	100%	289,411,000.00	
				5	01	01	2.05	01			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana yang ditingkatkan	-	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut yang diadakan	80 Stel Pakaian Dinas	80 Stel Pakaian Dinas	100,000,000.00	80 Stel Pakaian Dinas	100,000,000.00	80 Stel Pakaian Dinas	100,000,000.00
				5	01	01	2.05	03			Pendataaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan dan Data Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.05	04			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.05	05			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai yang Dimonitoring, Evaluasi dan Dinilai	80 Orang	80 Orang	-	80 Orang	-	80 Orang	-

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kodeifikasi					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan							
				Urusan	Bid. Urusan	Prog	Keg	Sub Keg					Target	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5					6			7	8							
				5	01	01	2.05	09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	5 Orang	89,269,000.00	5 Orang	80,000,000.00	5 Orang	81,837,000.00
				5	01	01	2.05	10				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.05	11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	6 Orang	121,014,000.00	5 Orang	121,014,000.00	6 Orang	107,574,000.00
				5	01	01	2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	1,223,355,500.00	100%	1,144,840,000.00	100%	938,533,800.00
				5	01	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	18 Jenis	18 Jenis	12,135,000.00	18 Jenis	17,135,000.00	18 Jenis	13,000,000.00
				5	01	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	68 Jenis	68 Jenis	141,058,500.00	68 Jenis	141,058,500.00	68 Jenis	160,000,000.00
				5	01	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	11,548,000.00	6 Jenis	10,000,000.00	6 Jenis	12,971,000.00
				5	01	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	199,472,500.00	4 Jenis	199,472,500.00	4 Jenis	194,470,800.00
													Jumlah Jenis Peralatan dan Bahan Pembersih yang disediakan	33 Jenis	33 Jenis		33 Jenis		33 Jenis	
				5	01	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	80,645,000.00	3 Jenis	75,000,000.00	3 Jenis	85,000,000.00
				5	01	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan (Eksemplar Majalah/Koran/Surat Kabar/Buku dan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan)	2 Jenis	2 Jenis	65,330,000.00	2 Jenis	12,000,000.00	2 Jenis	13,748,000.00
				5	01	01	2.06	07				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan Material yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	40,392,500.00	12 Bulan	18,000,000.00	12 Bulan	18,990,000.00
				5	01	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar / Dalam Daerah	70 Kegiatan	70 Kegiatan	672,774,000.00	60 Kegiatan	672,174,000.00	75 Kegiatan	440,354,000.00
				5	01	01	2.06	10				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Jenis Arsip Dinamis yang Didokumentasikan	500 Arsip Dinamis	500 Arsip Dinamis	-	500 Arsip Dinamis	-	500 Arsip Dinamis	-
				5	01	01	2.06	11				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD terhadap RKBM	100%	100%	1,481,311,426.00	100%	76,000,000.00	100%	454,200,000.00
				5	01	01	2.07	01				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan			-	-	-	-	-
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang Berorientasi Pada Pemerintahan Transparan dan			5	01	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	2 Unit	2 Unit	14,657,426.00	1 Unit	6,000,000.00	2 Unit	10,000,000.00
				5	01	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	5 Unit	5 Unit	89,844,000.00	4 Unit	70,000,000.00	5 Unit	89,950,000.00
				5	01	01	2.07	07				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang Diadakan			-	-	-	-	-
				5	01	01	2.07	08				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Diadakan	-	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.07	09				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung/Kantor Yang Diadakan	1 Bangunan Perluasan Aula	1 Bangunan Perluasan Aula	1,376,810,000.00	-	-	1 Gudang Arsip	354,250,000.00
				5	01	01	2.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	-	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	-	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	573,632,342.00	100%	523,632,342.00	100%	867,396,336.00
				5	01	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	100 Surat	100 Surat	-	100 Surat	-	100 Surat	-
				5	01	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kwh Rekening Listrik yang dibayarkan 1 tahun	87000 kWh	87000 kWh	256,305,300.00	87000 kWh	256,305,300.00	87000 kWh	282,644,400.00
													Jumlah Tagihan Bulanan Telepon Kabel yang dibayarkan 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
													Jumlah Tagihan m3 Air PDAM yang dibayarkan 1 tahun	720 m3	720 m3		720 m3		720 m3	
													Jumlah Tagihan Bulanan Internet yang dibayarkan 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
													Jumlah Tagihan Bulanan TV Kabel yang dibayarkan 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
				5	01	01	2.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Administrasi Keuangan yang Dibayarkan	7 Jenis	7 Jenis	317,327,042.00	7 Jenis	267,327,042.00	7 Jenis	584,751,936.00
				5	01	01	2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang yang Dipelihara terhadap Jumlah Seluruh Aset di BAPPEDA	100%	100%	414,522,925.00	100%	384,522,925.00	100%	345,149,000.00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kodefikasi					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								
				Urusan	Bid. Urusan	Prog	Keg	Sub Keg			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5					6	7	8								
				5	01	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas / Jabatan Yang dipelihara	1 Unit/12 bulan	1 Unit/12 bulan	77,390,000.00	1 Unit/12 bulan	57,390,000.00	1 Unit/12 bulan	57,390,000.00
				5	01	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas / Operasional Yang dipelihara	25 Unit/ 12 bulan	25 Unit/ 12 bulan	161,630,000.00	25 Unit/ 12 bulan	151,630,000.00	25 Unit/ 12 bulan	117,664,000.00
				5	01	01	2.09	05			Pemeliharaan Meubel	Jumlah Meubel yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki/dipelihara	130 Unit	130 Unit	57,240,000.00	130 Unit	57,240,000.00	100 Unit	48,580,000.00
				5	01	01	2.09	07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang diperbaiki/ dipelihara	-	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.09	08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung/Kantor yang Dipelihara	3 bangunan	3 bangunan	118,262,925.00	2 Bangunan	118,262,925.00	3 Bangunan	121,515,000.00
				5	01	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rekabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-
				5	01	01	2.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	5	01	02					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	2,230,023,900.00	100%	2,369,111,898.00	100%	4,037,335,253.00
			Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD									Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%		100%		100%	
												Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada		Ada		Ada	
												Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada		Ada		Ada	
	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur perencanaan											Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada		Ada		Ada	
				5	01	02	2.01				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen (RKPD murni, Perubahan RKPD dan Perubahan	3 Dokumen (RKPD murni, Perubahan RKPD dan Perubahan	1,115,619,400.00	2 Dokumen (RKPD murni dan Perubahan RKPD)	1,010,000,000.00	3 Dokumen (RKPD murni, Perubahan RKPD dan	2,964,144,932.00
				5	01	02	2.01	01			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
				5	01	02	2.01	02			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
				5	01	02	2.01	03			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik	2 Kegiatan	2 Kegiatan	143,559,600.00	1 Kegiatan	110,000,000.00	2 Kegiatan	286,613,500.00
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang Berorientasi Pada Pemerintahan Transparan dan Akuntabel											Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi Publik	1 Dokumen Rancangan Awal RKPD dan 1 Dokumen	1 Dokumen Rancangan Awal RKPD dan 1 Dokumen		1 Dokumen Rancangan Awal RKPD		1 Dokumen Rancangan Awal RKPD dan 1 Dokumen	
				5	01	02	2.01	04			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	131,288,700.00	1 Kegiatan	110,000,000.00	2 Kegiatan	186,216,000.00
												Jumlah Dokumen Hasil Forum Gabungan Perangkat Daerah RKPD	1 Dokumen Rancangan RKPD dan 1 Dokumen	1 Dokumen Rancangan RKPD dan 1 Dokumen		1 Dokumen Rancangan RKPD		1 Dokumen Rancangan RKPD dan 1 Dokumen	
	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang Akurat dan Mutakhir			5	01	02	2.01	05			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kabupaten	2 Kegiatan	2 Kegiatan	132,685,900.00	1 Kegiatan	195,000,000.00	2 Kegiatan	246,394,500.00
												Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD	1 Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan 1 Dokumen	1 Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan 1 Dokumen		1 Dokumen Rancangan Akhir RKPD		1 Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan 1 Dokumen	
				5	01	02	2.01	06			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Koodinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	10 Dokumen	42,730,000.00	10 Dokumen	235,000,000.00	10 Dokumen	1,681,874,932.00
				5	01	02	2.01	07			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD Murni	1 Dokumen Perbup	1 Dokumen Perbup	665,355,200.00	1 Dokumen Perbup	360,000,000.00	1 Dokumen Perbup	563,046,000.00
												Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RKPD	1 Dokumen Rancangan	1 Dokumen Rancangan		1 Dokumen Rancangan		1 Dokumen Rancangan	
												Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD	1 Dokumen Rancangan Akhir	1 Dokumen Rancangan Akhir		1 Dokumen Rancangan Akhir		1 Dokumen Rancangan	
												Jumlah Dokumen Perubahan RKPD	1 Dokumen Perbup Perubahan RKPD	1 Dokumen Perbup Perubahan RKPD		1 Dokumen Perbup		1 Dokumen Perbup	
												Jumlah Dokumen Revisi RPJMD	1 Dokumen Perda perubahan RPJMD	1 Dokumen Perda perubahan RPJMD				1 Dokumen Perda RPJMD	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kodefikasi					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan							
				Urusan	Bid. Urusan	Prog	Keg	Sub Keg			Target	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur perencanaan			5	01	02	2.02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Jenis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dianalisis	5 Jenis	5 Jenis	557,626,500.00	5 Jenis	644,111,898.00	5 Jenis	730,000,000.00
				5	01	02	2.02	01		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Penyajian Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	323,834,500.00	1 Dokumen	305,000,000.00	1 Dokumen	186,642,000.00
				5	01	02	2.02	02		Pembiinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pembiinaan dan Pemanfaatan Data Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	233,792,000.00	1 Dokumen	275,000,000.00	1 Dokumen	323,358,000.00
											Jumlah Perangkat Daerah Penyedia Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang dibina	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah		23 Perangkat Daerah		23 Perangkat Daerah	
				5	01	02	2.02	03		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Pembangunan Daerah/Kota	1 Dokumen/Buku Profil	1 Dokumen/Buku Profil	-	1 Dokumen/Buku	64,111,898.00	1 Dokumen/Buku	220,000,000.00
Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah			5	01	02	2.03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Program RPJMD Tahun Berkenaan	133 Program	133 Program	556,778,000.00	138 Program	715,000,000.00	139 Program	343,190,321.00
											Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk ke Dalam RKPD Tahun Berkenaan	133 Program	133 Program		138 Program		139 Program	
											Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk ke APBD Tahun Berkenaan	133 Program	133 Program		138 Program		139 Program	
											Jumlah Program APBD Tahun Berkenaan	133 Program	133 Program		138 Program		139 Program	
				5	01	02	2.03	01		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	120,360,000.00	1 Laporan	315,000,000.00	1 Laporan	150,000,000.00
				5	01	02	2.03	02		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Kerjasama Daerah	1 Laporan	1 Laporan	52,376,000.00	1 Laporan	230,000,000.00	-	-
				5	01	02	2.03	03		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan APBD	4 Laporan	4 Laporan	384,042,000.00	4 Laporan	170,000,000.00	4 Laporan	193,190,321.00
											Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	-		-	1 Dokumen	-
				5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	1,759,092,000.00	100%	4,333,000,000.00	100%	2,102,344,000.00
											Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%		100%		100%	
											Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	100%		100%		100%	
											Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%		100%		100%	
											Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%		100%		100%	
											Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%		100%		100%	
											Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada		Ada		Ada	
											Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Sesuai (50%)	Sesuai (50%)		Sesuai (50%)		Sesuai (50%)	
				5	01	03	2.01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	50 Program	50 Program	827,800,000.00	54 Program	1,333,000,000.00	55 Program	682,344,000.00
											Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk kedalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	50 Program	50 Program		54 Program		55 Program	
											Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk kedalam APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	50 Program	50 Program		54 Program		55 Program	
	Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Melalui Optimalisasi										Jumlah Program APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	50 Program	50 Program		54 Program		55 Program	
				5	01	03	2.01	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan	11 Laporan	253,930,000.00	7 Laporan	145,000,000.00	11 Laporan	191,720,000.00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kodefikasi					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								
				Urusan	Bid. Urusan	Prog	Keg	Sub Keg			Target	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
												Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
1	2	3	4	5					6			7	8						
				5	01	03	2.01	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	114,600,000.00	2 Laporan	160,000,000.00	2 Laporan	13,300,000.00
				5	01	03	2.01	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	151,894,000.00	2 Laporan	240,000,000.00	2 Laporan	211,500,000.00
				5	01	03	2.01	04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	146,000,000.00	1 Laporan	43,000,000.00	1 Laporan	81,913,500.00
												Jumlah Rencana Aksi RANHAM yang dilaporkan di Kab. Seruyan	9 Rencana Aksi	9 Rencana Aksi	-	9 Rencana Aksi	-	9 Rencana Aksi	-
				5	01	03	2.01	05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11 Laporan	11 Laporan	54,926,000.00	7 Laporan	145,000,000.00	11 Laporan	55,784,000.00
				5	01	03	2.01	06			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	9,230,000.00	2 Laporan	110,000,000.00	2 Laporan	13,000,000.00
				5	01	03	2.01	07			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	51,894,000.00	2 Laporan	250,000,000.00	2 Laporan	10,500,000.00
				5	01	03	2.01	08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	45,326,000.00	1 Laporan	240,000,000.00	1 Laporan	104,626,500.00
				5	01	03	2.02				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun Berkenaan	42 Program	42 Program	539,540,000.00	44 Program	1,870,000,000.00	43 Program	660,000,000.00
												Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk kedalam RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun Berkenaan	42 Program	42 Program		44 Program		43 Program	
												Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk kedalam APBD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun Berkenaan	42 Program	42 Program		44 Program		43 Program	
												Jumlah Program APBD Bidang Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun Berkenaan	42 Program	42 Program		44 Program		43 Program	
				5	01	03	2.02	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	11 Laporan	11 Laporan	165,420,000.00	7 Laporan	245,000,000.00	11 Laporan	70,000,000.00
				5	01	03	2.02	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	10,600,000.00	2 Laporan	210,000,000.00	2 Laporan	65,000,000.00
				5	01	03	2.02	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	52,524,000.00	2 Laporan	240,000,000.00	2 Laporan	10,000,000.00
				5	01	03	2.02	04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	41,736,000.00	1 Laporan	240,000,000.00	1 Laporan	135,000,000.00
				5	01	03	2.02	05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	11 Laporan	11 Laporan	52,174,000.00	7 Laporan	245,000,000.00	11 Laporan	70,000,000.00
				5	01	03	2.02	06			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	17,986,000.00	2 Laporan	210,000,000.00	2 Laporan	115,000,000.00
				5	01	03	2.02	07			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	148,800,000.00	2 Laporan	240,000,000.00	2 Laporan	110,000,000.00
				5	01	03	2.02	08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	50,300,000.00	1 Laporan	240,000,000.00	1 Laporan	85,000,000.00
				5	01	03	2.03				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	41	41	391,752,000.00	40	1,130,000,000.00	41	760,000,000.00
												Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk ke Dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	41	41		40		41	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kodefikasi					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan									
				Urusan	Bid. Urusan	Prog	Keg	Sub Keg			Target	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
												Rp		Rp		Rp				
1	2	3	4	5					6			7	8							
												Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk ke APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	41	41		40		41		
												Jumlah Program APBD Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	41	41		40		41		
				5	01	03	2.03	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11 Laporan	11 Laporan	100,880,000.00	7 Laporan	185,000,000.00	11 Laporan	220,000,000.00
				5	01	03	2.03	02				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	19,768,000.00	2 Laporan	210,000,000.00	2 Laporan	15,000,000.00
				5	01	03	2.03	03				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	50,652,000.00	2 Laporan	140,000,000.00	2 Laporan	110,000,000.00
				5	01	03	2.03	04				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	59,652,000.00	1 Laporan	145,000,000.00	1 Laporan	140,000,000.00
				5	01	03	2.03	05				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	11 Laporan	11 Laporan	42,814,000.00	7 Laporan	145,000,000.00	11 Laporan	80,760,000.00
				5	01	03	2.03	06				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	17,986,000.00	2 Laporan	125,000,000.00	2 Laporan	63,500,000.00
				5	01	03	2.03	07				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	50,000,000.00	2 Laporan	90,000,000.00	2 Laporan	62,500,000.00
Meningkatkan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Sebagai Bahan Acuan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan			5	01	03	2.03	08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	90,000,000.00	1 Laporan	68,240,000.00
				5	05							PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				733,600,000.00		600,000,000.00		520,000,000.00
		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	5	05	02						PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	80%	80%	733,600,000.00	80%	600,000,000.00	80%	520,000,000.00
													Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	80%	80%		80%		80%	
													Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	80%	80%		80%		80%	
													Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	80%	80%		80%		80%	
				5	05	02	2.01					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5 Dokumen	5 Dokumen	146,100,000.00	4 Dokumen	120,000,000.00	4 Dokumen	130,000,000.00
				5	05	02	2.01	12				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Jumlah Jenis Data Kelitbangan dan Pengkajian Peraturan yang Dikelola	5 Jenis Dokumen	5 Jenis Dokumen	146,100,000.00	4 Jenis Dokumen	120,000,000.00	4 Jenis Dokumen	130,000,000.00
				5	05	02	2.02					Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	180,000,000.00	1 Dokumen	-
				5	05	02	2.02	03				Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-
				5	05	02	2.02	05				Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-
				5	05	02	2.02	06				Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
				5	05	02	2.02	11				Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Transmigrasi	-	-	-	1 Dokumen	180,000,000.00	-	-
				5	05	02	2.03					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	120,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00
				5	05	02	2.03	02				Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Industri dan Perdagangan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	200,000,000.00
				5	05	02	2.03	04				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	-	-	-	-	-	-	-
				5	05	02	2.03	05				Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
				5	05	02	2.03	06				Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000.00	-	-	-	-

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kodefikasi					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan							
				Urusan	Bid. Urusan	Prog	Keg	Sub Keg					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
																			Target	Target
1	2	3	4	5					6			7	8							
				5	05	02	2.03	07				Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	1 Dokumen	120,000,000.00	-	-
				5	05	02	2.03	09				Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-	-	-
				5	05	02	2.03	11				Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Perkintan	-	-	-	-	-	-	-
				5	05	02	2.04					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengembangkan Inovasi dan Teknologi	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	287,500,000.00	5 Perangkat Daerah	180,000,000.00	5 Perangkat Daerah	190,000,000.00
				5	05	02	2.04	01				Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	140,000,000.00	1 Dokumen	90,000,000.00	1 Dokumen	95,000,000.00
				5	05	02	2.04	02				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-
				5	05	02	2.04	04				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	2 Laporan	2 Laporan	147,500,000.00	2 Laporan	90,000,000.00	2 Laporan	95,000,000.00
				5	05	02	2.04	05				Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Hasil Inovasi dan Teknologi yang Dipatenkan	1 Hasil Inovasi	1 Hasil Inovasi	-	1 Hasil Inovasi	-	1 Hasil Inovasi	-
												liat di kepmen 50				13,297,157,000.00		14,357,310,000.00		14,357,660,000.00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappedalitbang Kabupaten Seruyan. Indikator kinerja Bappedalitbang ditetapkan dengan mempertimbangkan Indikator Kinerja Daerah baik itu Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seruyan maupun Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah.

Adapun Indikator Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang termuat dalam Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPD Kabupaten Seruyan 2024-2026 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Bappedalitbang pada RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

Tujuan/sasaran	Indikator	Target Tahun		
		2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%
	Nilai SAKIP			
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	100%	100%	100%
Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD			
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	80%	80%	80%

Sumber : RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang menjabarkan pelaksanaan RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah supaya lebih terukur dan akuntabel dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 ini disusun sebagai acuan kebijakan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program-program dalam dokumen RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang termuat dalam dokumen Renstra ini, sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Perangkat Daerah sehingga dapat diimplementasikan serta terlaksana dengan baik.

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini sasaran pembangunan Kabupaten Seruyan menjadi tercapai dan berhasil dengan baik.

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

